

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BANYUMAS  
PERIODE TAHUN 2013-2015**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :  
AULIA SUKMAWATI  
NIM. 1323205028**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BANYUMAS  
PERIODE TAHUN 2013-2015**

**Aulia Sukmawati**  
**NIM. 1323205028**

E-mail: aulia.uly3@gmail.com  
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Sektor perpajakan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan suatu negara. Tidak terkecuali pajak daerah yang dapat menjadi penunjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Salah satu pajak daerah yang menjadi sumber PAD di Kabupaten Banyumas adalah pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang mana pajak tersebut mulai dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada 1 Januari 2013 setelah sebelumnya pajak PBB dipungut oleh Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak PBB sebagai sumber PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2015.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2017. Dimana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif yang menggunakan rasio kontribusi dan efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015 berada dalam kategori kurang dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 10,59 %. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak PBB selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase lebih dari 100 % yaitu sebesar 112,98 %. Peran pajak PBB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas cukup signifikan, karena pajak PBB merupakan pajak daerah yang menyumbangkan realisasi terbesar apabila dibandingkan dengan komponen pajak daerah yang lain.

Kata kunci: kontribusi, efektivitas, pajak bumi dan bangunan, pad.

**THE ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF  
LAND AND BUILDING TAX (*PBB*) AS A SOURCES OF ORIGINAL LOCAL  
REVENUE (*PAD*) OF BANYUMAS IN 2013-2015**

**Aulia Sukmawati**  
**NIM. 1323205028**

E-mail: aulia.uly3@gmail.com  
Department of Islamic Economics Faculty of Economics and Islamic Business  
State Institute of Islamic Studies Purwokerto

**ABSTRACT**

The tax sector gives the great contribution to the income of a country. In addition, local taxes can also increase the Local Revenue Sources (*PAD*). As with taxes in general, local taxes have a dual role as a source of local revenue or budgetary and as a regulatory. One of the local taxes that becomes the source of *PAD* in Banyumas is the Land and Building Tax on Rural and Urban sectors (*PBB-P2*), which is collected by the Government of Banyumas on January 1, 2013 after the Land and Building Tax (*PBB*) collected by the Central Government. This study aimed at determining the contribution and effectiveness of *PBB* as a source of *PAD* of Banyumas in 2013-2015.

This study was conducted at Local Finances Agency (*BKD*) of Banyumas from February to August, 2017. This was a quantitative research applying a descriptive statistical analysis technique which used a contribution and effectiveness ratio.

The result of the study indicated that the contribution rate of *PBB* revenue toward *PAD* in Banyumas from 2013 to 2015 was in the low category, with the percentage of 10.59%. Meanwhile, *PBB* revenue collected for 3 years (2013-2015), was very effective with the percentage of more than 100% that was equal to 112.98%. The role of *PBB* as one of the sources of *PAD* in Banyumas is significant, because *PBB* gives the greatest contribution than other local tax components.

Keywords: contribution, effectiveness, land and building tax, *pad*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	14
A. Kajian Pustaka .....	14
1. Pajak.....	14

2. Pajak Daerah.....	21
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	29
4. Pajak Perspektif Ekonomi Islam.....	36
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	40
6. Kontribusi Penerimaan Pajak PBB .....	41
7. Efektivitas Penerimaan Pajak PBB .....	42
8. Penelitian Terdahulu .....	43
B. Kerangka Teori .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	52
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisis Data.....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	59
1. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.....	59
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas .....	60
B. Hasil dan Pembahasan .....	66

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015 .....	66
a. Kontribusi Pajak PBB Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	66
b. Kontribusi Pajak PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	68
2. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015 .....	70
C. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

IAIN PURWOKERTO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak minyak pada tahun 1983/84 dan berdampak pada menurunnya anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1984/85, maka timbullah kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintah daerah maupun dalam membiayai proyek-proyek pemerintah daerah. Untuk itu maka pemerintah pusat bertekad memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintahan di daerah. Dengan kata lain penurunan penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan.<sup>1</sup>

Menjelang berakhirnya tahun 2000 dan memasuki tahun 2001, sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan direalisasikan. Konsep dasarnya adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalah

---

<sup>1</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 15.

kebijakan moneter, pembangunan jalan antar kota dan provinsi, maupun pemeliharaan sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah.<sup>2</sup>

Dengan adanya otonomi daerah dimana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang baru.

A.B. Susanto,dkk. di dalam bukunya yang berjudul Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah, mengutip dari Bean dan Hussey, menerangkan bahwa sektor publik seperti instansi pemerintahan menghadapi kendala dalam hal kewajiban untuk menyediakan layanan tertentu sehingga tidak optimal dalam memenuhi ekspektasi pengguna. Kendala-kendala tersebut adalah: 1) Kendala legislasi, 2) Filosofi politik, 3) Kurangnya sumber daya fisik, 4) Kurangnya sumber daya keuangan.<sup>3</sup> Postulasi bahwa ekonomi Indonesia akan maju apabila perekonomian daerah juga berkembang adalah suatu hal yang merupakan keniscayaan di dalam pendekatan ekonomi agregat. Studi-studi empiris mengenai perkembangan perekonomian suatu negara dan perkembangan suatu daerah juga mendukung hal tersebut.

Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang mendelegasikan kewenangan (*discretion*) yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunannya di daerah. Dari sisi anggaran, delegasi kewenangan tersebut meliputi aspek pengeluaran dan

---

<sup>2</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik....*, hlm. 9.

<sup>3</sup> A.B. Susanto, et.al., *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah* (Jakarta: Esensi, 2010), hlm. 57. Dikutip dari Bean dan Hussey (1997).



penerimaan anggaran, perpajakan, peraturan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain. Desentralisasi fiskal (*Fiscal Decentralization*) merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang diidentifikasi mempunyai peranan penting dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah<sup>6</sup>. Salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi untuk

---

<sup>4</sup> Timbul Hamonangan Simanjutak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* (Depok: RAS, 2012), hlm. 133-134. Dikutip dari Sato and Yamasige (2000:2).

<sup>5</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

<sup>6</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik....*, hlm. 55-56.

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/ kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.<sup>7</sup>

Mulai 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas merealisasi pelaksanaan pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.758 hektare dan sekitar 32.307 hektare (sekitar 24,27 persen) diantaranya merupakan lahan sawah. Dari luas lahan sawah tersebut, 10.448 hektare diantaranya merupakan sawah dengan pengairan teknis.<sup>8</sup> Kabupaten Banyumas yang pusat pemerintahannya di Kota Purwokerto ini berada di jalur transportasi yang sangat strategis karena selain dilalui jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jateng serta jalur tengah Jateng antara Secang-Banyumas.

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Perpajakan- Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: Andi, 2016), hlm. 406.

<sup>8</sup> <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-banyumas>, diunduh 20 Desember 2016 Pukul 10.00

Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa dan termasuk salah satu sudut Segitiga Emas Jateng di samping Semarang dan Solo (Semarang Solo Purwokerto). Berkembang pesatnya wilayah permukiman di wilayah Kabupaten Banyumas berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan akan berdampak positif mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas. Sehingga mendorong derajat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), berikut disajikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2015.<sup>9</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>9</sup> Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Banyumas

Tabel 1.1  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas  
Periode Tahun 2013-2015

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2013	Pajak Daerah	82.891.980.000,00	111.290.149.783,00	134,26
	Retribusi Daerah	36.345.454.666,00	35.193.668.496,00	96,83
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.192.884.726,00	10.578.804.726,00	103,79
	Lain-lain PAD yang Sah	140.456.505.531,00	151.286.811.314,00	107,71
	<b>Jumlah</b>	<b>269.886.824.923,00</b>	<b>308.349.434.319,00</b>	<b>114,25</b>
2014	Pajak Daerah	105.300.000.000,00	110.189.330.128,00	104,64
	Retribusi Daerah	43.785.757.779,00	43.892.027.090,00	100,24
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.674.209.360,00	11.775.017.338,00	100,86
	Lain-lain PAD yang Sah	217.154.882.190,00	269.741.314.086,40	124,22
	<b>Jumlah</b>	<b>377.914.849.329,00</b>	<b>435.597.688.642,40</b>	<b>115,26</b>
2015	Pajak Daerah	120.550.000.000,00	129.678.372.181,00	107,57
	Retribusi Daerah	23.692.108.050,00	26.470.056.948,00	111,74
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.811.840.094	14.832.112.349,00	107,39
	Lain-lain PAD yang Sah	293.505.239.424,00	331.300.807.982,00	112,81
	<b>Jumlah</b>	<b>451.559.187.568,00</b>	<b>502.281.349.460</b>	<b>111,23</b>

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013-2015 selalu mengalami peningkatan. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari lain-lain PAD yang sah menyumbangkan angka terbesar setiap tahunnya dalam rentan waktu tahun 2013-2015. Sedangkan PAD yang berasal dari pajak daerah dari tahun 2013-2015

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 realisasi pajak daerah sebesar Rp 111.290.149.783,00. Realisasi pajak daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp 110.189.330.128,00. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi Rp 129.678.372.181,00.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>10</sup>

Tahun 2013 merupakan tahun pertama pajak PBB dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, oleh karena itu perlu diketahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas dari PBB terhadap PAD Kabupaten Banyumas selama periode 3 tahun terakhir. Sehingga dengan adanya desentralisasi fiskal yang dalam hal ini dialami oleh pajak PBB, dapat memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap PAD Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan dan mengetahui tentang kontribusi dan efektivitas pajak PBB terhadap PAD Kabupaten Banyumas.

---

<sup>10</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan....*, hlm. 53.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul, **“ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2013-2015”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian istilah, maka perlu kiranya dijelaskan dari judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan, juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

### **1. Kontribusi**

Kontribusi merupakan suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.<sup>11</sup>

Rasio Kontribusi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi dari pajak PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas.

---

<sup>11</sup> Rima Adelina, 2013, “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik”, <http://ejournal.unesa.ac.id/article/1250/57/article.pdf>, diakses 2 Maret 2017, pukul 11:38

Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi *Smith's canons* yang meliputi:<sup>12</sup>

- a. Unsur keadilan (*equity*)
- b. Unsur kepastian (*certainty*)
- c. Unsur kelayakan (*convenience*)
- d. Efisien (*economy*)
- e. Unsur ketetapan (*adequacy*)

## 2. Efektivitas PBB

Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, namun demikian pekerjaan yang efektif belum tentu efisien. Efektivitas yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak PBB di Kabupaten Banyumas dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator untuk menilai keberhasilan pajak daerah, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Hasil pemungutan pajak yang memadai
- b. Adil secara horisontal dan vertikal
- c. Berdaya guna secara ekonomi
- d. Dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

---

<sup>12</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik...*, hlm. 56-57. Dikutip dari Harold M. Groves (1951)

<sup>13</sup> Nick Devas et.al, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), hlm. 61-62.

### 3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang PBB pedesaan dan perkotaan, yaitu pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan kepada perorangan atau badan yang secara nyata mempunyai atau memiliki, menguasai, ataupun memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya.<sup>14</sup> Karena pajak dari sektor tersebut masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Penulis akan melakukan penelitian dari periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, karena tahun 2013 merupakan awal pelaksanaan pemungutan pajak PBB oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Pada saat melakukan penelitian, penulis memperoleh informasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banyumas bahwa data tahun 2016 belum selesai diproses secara keseluruhan. Sehingga penulis akan melakukan penelitian sampai dengan tahun 2015.

### 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

---

<sup>14</sup> Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi* (Malang: Empatdua Media, 2015), hlm. 249.

<sup>15</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik....*, hlm. 55.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dari pajak PBB pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kontribusi pajak PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015.
2. Mengetahui tingkat efektivitas dari pajak PBB pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari peneliti ini diharapkan untuk:

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya tentang pajak PBB. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi penelitian lain yang juga meneliti mengenai tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang pajak khususnya mengenai pajak PBB.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan dalam melaksanakan pungutan pajak daerah khususnya pajak PBB.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan bahan bacaan atau referensi tentang pajak PBB.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara umum gambaran sistematika Penulisan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

### Bab 1 Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan pembahasan.

### Bab 2 Landasan Teori

Bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan pajak daerah terutama pajak PBB.

### Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

#### Bab 4 Pembahasan hasil penelitian

Bab ini meliputi deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu DPPKAD/ BKD Kabupaten Banyumas, terdiri dari sejarah pendirian, letak geografis, visi misi dan sasaran perusahaan, serta struktur organisasi. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisis data yang menjawab tentang kontribusi dan efektivitas pajak PBB terhadap PAD Kabupaten Banyumas.

#### Bab 5 Penutup

Mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Pada bagian akhir penelitian, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.

IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015 berada dalam kategori kurang dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 10,59 %. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak PBB selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase lebih dari 100 % yaitu sebesar 112,98 %.

Namun demikian, unsur keadilan di dalam pencapaian efektivitas pajak belum terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, diharapkan agar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah rezim Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) harus dikontrol dengan baik agar tidak menimbulkan bias yang sangat besar antar daerah.

Peran pajak PBB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas cukup signifikan, karena pajak PBB merupakan pajak daerah yang menyumbangkan realisasi terbesar apabila dibandingkan dengan komponen pajak daerah yang lain.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) hendaknya dapat mempertahankan bahkan meningkatkan efektivitas pajak PBB agar penerimaan pajak PBB lebih optimal sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas harus terus meningkatkan kinerjanya dengan tetap mengatasi kendala-kendala yang ada agar kendala tersebut tidak mengganggu potensi penerimaan pajak PBB. Salah satunya adalah memberikan pengarahan kepada masyarakat agar pembayaran pajak PBB dilakukan langsung di tempat pembayaran yang sah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng)/ Bank Jateng.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas publik bagi masyarakat Kabupaten Banyumas.
4. Mengoptimalkan sumber daya pemerintah daerah terutama SDM yang ahli dalam penilaian properti dalam hal untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga pemutakhiran data NJOP dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Devas, Nick. et.al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Abdul. 2010. *Statistika Deskriptif untuk Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Karim, Adiwarmarman Azhar. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan- Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Minarni. 2015. *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Simanjutak, Hamonangan Timbul. dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: RAS.
- Soemitro, Rochmat. 1989. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. t.k.: PT Eresco.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Supranto, J. 1981. *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Susanto, A.B. et.al. 2010. *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Esensi.
- Susyanti, Jeni. dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empatdua Media.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

## NON BUKU

- Adelina, Rima. 2013. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik", <http://ejournal.unesa.ac.id/article/1250/57/article.pdf>.
- Adhalia, Dini Nur. 2015. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2011-2014)," Skripsi, Bandung: Universitas Widyatama.
- Arditia, Reza. t.t. "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya", <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4068/57/article.pdf>.
- Azhar, Dwi Novi. 2012. "PBB dan Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak" [https://www.kompasiana.com/novidwiazhar/pbb-dan-kesadaran-masyarakat-sebagai-wajib-pajak\\_550f14be813311ae33bc5f9f](https://www.kompasiana.com/novidwiazhar/pbb-dan-kesadaran-masyarakat-sebagai-wajib-pajak_550f14be813311ae33bc5f9f).
- Catatan atas Laporan Keuangan Keuangan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2015.
- Damaiyanti, Ni Putu Dian. dan I Putu Ery Setiawan. 2014. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013", <https://ojs.unud.ac.id>.
- Dokumen Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.  
<http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-banyumas>.  
<http://www.pajak.go.id/content/article/harga-pasar-wajar-atau-njop>.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)", Vol. 7, No. 2,

<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/977183fcd59fb4916ac53aba59702cfd54d9d078.pdf>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

